

Judul : BU Sri, Pak Basuki Minta 49 Triliun Tuh
Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-8

BANGUN KANTOR PRESIDEN, WAPRES,
GEDUNG DPR, MPR, JALAN, DLL...

Bu Sri, Pak Basuki Minta 49 Triliun Tuh

KEMENTERIAN PUPR bersiap membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dana yang dibutuhkan cukup besar. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Rp 46 triliun ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Rencana pembangunan ini dipaparkan Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Yang akan dibangun lebih dahulu di IKN adalah Istana Presiden, Istana Wapres, Gedung DPR, Gedung MPR, jalan, fasilitas air baku, dan jaringan listrik. Namun, sampai saat ini, Kementerian PUPR belum mendapat alokasi anggaran pembangunan itu.

"Sampai saat ini, tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Karena dalam surat

Kemenkeu dan Bappenas, pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," ungkap Basuki, di hadapan anggota Dewan.

Karena itu, Basuki kemudian menyusun dan mengusulkan ke Sri Mulyani agar mendapat aliran APBN untuk pembangunan KIPP periode 2022-2024. "Itu anggarannya sekitar Rp 46 triliun sekian. Nah, ini sedang sama Bu Menkeu," akunya.

Basuki tidak tahu mengenai anggaran proyek IKN berasal dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau bukan. Harapannya, pembangunan IKN ini tidak membebani anggaran Kementerian PUPR. Sebab, anggaran IKN tidak ada dalam Daftar

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

Bu Sri, Pak Basuki ... DARI HALAMAN 1

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Tapi, kalau itu di-*refocusing* dari DIPA, saya akan jaga betul yang untuk kerakyatan ini. Karena nggak mungkin Rp 46 triliun dibebankan pada DIPA kita semua," ucap Basuki.

Seperti diketahui, Undang-Undang IKN telah disahkan, Selasa (18/1) pekan lalu. Pembiayaan pembangunan IKN termuat dalam beberapa opsi. Pertama, menggunakan APBN. Kedua, dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Artinya, membuka peluang investasi bagi perusahaan nasional maupun internasional untuk membiayai pembangunan IKN.

Sementara, dalam DIPA 2022, alokasi anggaran Kementerian PUPR

sebesar Rp 100,6 triliun. Anggaran ini sudah dibagi habis. Sebanyak Rp 41,2 triliun akan digunakan untuk proyek sumber daya air. Lalu, Rp 39,7 triliun untuk bidang jalan dan jembatan, Rp 12,5 triliun bidang permukiman, Rp 5,1 triliun untuk bidang perumahan. Sedangkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang dialokasikan sebesar Rp 2,1 triliun.

Lalu, apakah anggaran IKN sudah disiapkan Sri Mulyani? Saat dikonfirmasi mengenai ini, Kementerian Keuangan belum merespons. Tadi malam, *Rakyat Merdeka* mengkonfirmasi ke beberapa pejabat Kemenkeu. Seperti ke Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dan Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata. Namun, keduanya puasa bicara.

Dari DPR, Anggota Komisi XI Hen-

drawan Supratikno yakin, Sri Mulyani punya jalan keluar. Terlebih, ada skenario *blended financing*. Anggaran APBN sifatnya untuk memancing investor swasta dan bentuk pembiayaan lainnya (*crowding-in*). "Kita lihat nanti. Yang jelas, dengan telah disahkannya Undang-Undang IKN, maka sejumlah program dapat diusulkan dan diakomodasi," ujar politisi senior PDIP itu.

Anggota Panitia Khusus RUU IKN Achmad Baidowi kasih solusi. Kata dia, anggaran IKN bisa dialokasikan melalui APBN Perubahan. Untuk sumbernya, akan dibahas bersama Pemerintah dan DPR. Apakah dari realokasi anggaran di kementerian, atau dari sumber lain.

"Soal itu kan nanti nunggu payung hukum Undang-Undang IKN diundangkan, ada nomornya, baru itu bisa berlaku. Kemudian bisa ditindaklanjuti lewat APBN. Yang memungkinkan

adalah APBN Perubahan," terang politisi yang akrab disapa Awiek itu.

Peneliti Indef, Sugiyono Madelan menyatakan, kondisi ini memerlukan bahwa anggaran IKN belum final. Dengan kondisi ini, ada dua cara yang kemungkinan dilakukan pemerintah: merevisi APBN 2022 dan lebih giat mencari investor untuk IKN.

Sugiyono meminta Pemerintah lebih mematangkan perencanaan IKN. Kehati-hatian juga penting agar publik tidak mengira IKN sebagai kegiatan pencitraan atau *gimmick* belaka.

"Pemerintah harus menunjukkan benar-benar akan mampu merealisasikan perencanaan IKN secara cermat di tengah berbagai tantangan nyata terhadap peningkatan serangan Omicron, belum pulihnya perekonomian nasional, dan menyongsong Pilpres dan Pileg 2024," sarannya. ■ MEN